



## Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individual, dan *Locus Of Control* Pada Pencegahan *Fraud*

I Gde Made Dhiyo Mahautama<sup>1\*</sup>, Henny Triyana Hasibuan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Sarjana Akuntansi Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

Korespondensi Penulis: [diodhi072002@gmail.com](mailto:diodhi072002@gmail.com)\*

**Abstract.** *Prevention of fraud is really needed, especially in the management of village funds, so that the management and use of village funds can be in accordance with the direction and objectives of village development. The aim of this research is to empirically test the influence of village apparatus competence, internal control system, individual morality, and locus of control on preventing fraud in managing village funds. This research was conducted in 27 villages in Denpasar City, Bali with a sample of village officials using non-probability sampling, namely using a purposive sampling technique. The sample obtained in this study was 81 people. Data analysis uses multiple linear regression. The results of the analysis show that the competence of village officials has a positive effect on preventing fraud in managing village funds. The internal control system has a positive effect on preventing fraud in managing village funds. Individual morality has a positive effect on preventing fraud in managing village funds. Locus of control has a positive effect on preventing village fund management. The implication of this research is that by increasing the competence of village officials, implementing an adequate internal control system, the better individual morality implemented and supported by a good locus of control will be able to increase fraud prevention in managing village funds.*

**Keywords:** *Fraud, Competence, Internal control system, Individual morality, Locus of control.*

**Abstrak.** Pencegahan kecurangan (*fraud*) sangat dibutuhkan khususnya dalam pengelolaan dana desa, agar pengelolaan dan penggunaan dana desa dapat sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, moralitas individual, dan *locus of control* pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada 27 desa yang ada di Kota Denpasar, Bali dengan sampel aparatur desa melalui *non probability sampling* yaitu dengan teknik *purposive sampling* yang diperoleh sampel dalam penelitian ini sebanyak 81 orang. Data analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. *Locus of control* berpengaruh positif pada pencegahan pengelolaan dana desa. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya peningkatan kompetensi aparatur desa, penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, semakin baik moralitas individual yang dilaksanakan serta didukung oleh *locus of control* yang baik akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** *Fraud, Kompetensi, Sistem pengendalian internal, Moralitas individual, locus of control.*

### 1. PENDAHULUAN

*Fraud* atau kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi. Terjadinya *fraud* dapat menyebabkan data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi tidak obyektif dan menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja serta dalam membuat keputusan. Laporan keuangan yang mengandung *fraud* tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan semacam

itu justru dapat mengaburkan kinerja, kondisi, dan prospek entitas di mata para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat (Khoiriyah, 2021).

*Fraud* tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan besar, namun dapat terjadi dalam ruang lingkup desa. Pengelolaan keuangan desa rentan terhadap penyelewengan dan kecurangan karena pengendalian internal yang belum maksimal. Tingkat *fraud* dalam pengelolaan keuangannya relatif tinggi dibandingkan institusi lain. Hal ini dikarenakan sistem pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa adat yang masih lemah (Wiguna et al., 2022). Menurut lembaga ICW, kasus korupsi pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan signifikan pascapandemi Covid-19 dibandingkan sebelumnya. Data menunjukkan bahwa pada 2019, kasus korupsi anggaran desa hanya berkisar 16,97% dari total kasus korupsi secara keseluruhan. Namun, angka tersebut meningkat pesat di tahun 2020 menjadi 26,04% dari total kasus korupsi.

Berdasarkan data dari Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) di Provinsi Bali, selama periode 2016-2020 tercatat ada 50 kasus korupsi secara total. Dari 50 kasus tersebut, 8 di antaranya merupakan kasus korupsi terkait pengelolaan anggaran desa. Sementara itu, untuk wilayah Kota Denpasar sendiri tercatat empat kasus korupsi selama rentang waktu 2016 hingga 2020. Terjadi beberapa kasus *fraud* di wilayah Denpasar yang melibatkan dana desa oleh aparatur desa. Salah satunya, pada awal tahun 2020 ditemukan kasus dugaan korupsi APBD di Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara yang dilakukan oleh perbekel desa, kemudian kasus *fraud* APBDes juga terjadi di Desa Dauh Puri Klod yang dilakukan oleh mantan bendahara desa, Dimana hal ini menyebabkan kerugian negara kurang lebih 988 juta (Supartika, 2021).

Di tahun 2020 terdapat dugaan penyelewengan dana desa yang terjadi di Kota Denpasar. Mantan bendahara Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Ni Luh Putu Ariyaningsih (33) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Bali. Ia duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi APBDes 2017 Dauh Puri Klod, Denpasar Barat. Dimana dalam perkara ini, terdakwa bersama saksi Kepala Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, I Gusti Made Wira Namiartha (sekarang mantan) dan saksi Luh Made Cihna Kembar Dewi selaku sekretaris Desa Dauh Puri Klod telah merugikan keuangan negara Rp 988 juta lebih (Tribun Bali, 2020).

"Bahwa terdakwa bersama-sama saksi Kepala Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, I Gusti Made Wira Namiartha (sekarang mantan) dan saksi Luh Made Cihna Kembar Dewi selaku sekretaris Desa Dauh Puri Klod telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Jika antara beberapa

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut," jelas Jaksa Nengah Astawa. Dalam perkara ini, akibat perbuatan terdakwa Ariyaningsih bersama Wira Namiarta dan Made Cihna yang telah mengelola keuangan Desa Dauh Puri Klod secara tidak benar telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, keuangan daerah Kota Denpasar, keuangan Desa Dauh Puri Klod sebesar Rp 988.457.608,85. (Tribun Bali, 2020)

Berdasarkan fenomena tersebut, selain membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana desa, langkah-langkah pencegahan juga menjadi penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan. Pencegahan penipuan (*fraud*) adalah langkah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi atau mencegah faktor-faktor yang menyebabkan penipuan. Pencegahan penipuan dalam manajemen keuangan desa bisa dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, membentuk moralitas pada individu, dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal dan *locus of control*.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 13 Oktober 2023 telah mencapai Rp54,71 triliun. Jumlah dana desa yang dicairkan ini setara dengan 78,2 persen dari target Rp70 triliun (Rizki & Annasa, 2023).

**Tabel 1. Dana Desa Tahun Anggaran 2021 – 2023 di Provinsi Bali**

No	Daerah	2021 (dalam rupiah)	2022 (dalam rupiah)	2023 (dalam rupiah)
1	Kab. Badung	58.486.546	47.501.659	46.678.520
2	Kab. Bangli	65.113.263	55.559.929	57.953.622
3	Kab. Buleleng	130.380.171	126.128.286	127.241.53
4	Kab. Ginyar	65.196.455	58.985.409	66.099.928
5	Kab. Jembrana	54.539.683	42.432.139	41.297.678
6	Kab. Karangasem	85.289.248	77.843.710	77.300.664
7	Kab. Klungkung	55.854.813	45.857.734	46.167.533
8	Kab. Tabanan	124.144.971	117.486.524	113.858.178
9	Kota Denpasar	40.148.467	28.925.497	33.043.904
	Jumlah	679.123.617	600.720.887	609.641.582

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

Perbedaan dalam penerimaan alokasi dana oleh setiap desa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ukuran wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang menjadi pertimbangan dalam penentuan alokasi dana (Dewi & Damayanthi, 2019). Selama ini, dana desa yang diberikan pemerintah meningkat setiap tahunnya (Hayati & Amalia, 2021). Adapun pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pengimplementasian, penatausahaan, pelaporan, serta akuntabilitas (Syaifullah, 2015). Pengelolaan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan dan pembangunan menuju

masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Aparatur desa sangat berperan penting dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi *fraud* atau kecurangan akuntansi.

*Fraud* dapat dicegah dengan berbagai upaya dan tindakan seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan juga moralitas individual. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 kompetensi aparatur desa sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil di lingkup pemerintahan desa. Kompetensi itu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Aparatur desa dengan kompetensi tersebut, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa secara profesional, efektif, dan efisien. Kompetensi akan memungkinkan mereka bekerja sesuai standar dan etika yang berlaku, serta mencapai tujuan pelaksanaan tugas dengan hasil terbaik. Hal ini penting untuk membangun birokrasi desa yang berkualitas dan mampu memberikan layanan prima kepada masyarakat. Peningkatan kompetensi juga akan berdampak positif dalam pencegahan *fraud* di desa (Wiguna et al., 2022).

Selain kompetensi aparatur desa, Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi salah satu aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam pencegahan *fraud*. SPI mencakup berbagai kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur penggunaan sumber daya organisasi. Dengan menerapkan SPI yang efektif, risiko terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan aset, dan berbagai kecurangan lainnya dapat dikurangi. SPI yang kuat dapat mencegah dan mendeteksi adanya indikasi *fraud* sedini mungkin sehingga kerugian organisasi dapat diminimalisir. SPI merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi terkait keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Pratama, 2017).

Kecenderungan terjadinya *fraud* juga dapat dipengaruhi oleh moralitas dari aparatur desa. Moralitas seseorang berpengaruh pada perilaku dan kecenderungan melakukan kecurangan. Individu dengan moralitas rendah lebih cenderung melakukan kecurangan akuntansi karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kurang mematuhi aturan. Sebaliknya, individu bermoral tinggi lebih menghormati hukum dan standar etika sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan. Individu bermoral rendah, ketika menghadapi dilema etika, akan berperilaku berbeda dibandingkan individu bermoral baik. Mereka lebih memilih untuk melanggar aturan demi memenuhi keinginan pribadi tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Sementara individu bermoral tinggi akan berupaya bertindak benar sesuai nilai dan norma yang berlaku meskipun harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Mereka

memiliki integritas dan komitmen kuat untuk berperilaku etis. Sangat penting bagi organisasi untuk menanamkan nilai dan budaya etika agar individu memiliki moralitas tinggi, dengan moralitas tinggi, risiko kecurangan dapat ditekan karena individu lebih mementingkan tanggung jawab sosial dan kepatuhan pada aturan yang berlaku (Kuntadi et al., 2023).

*Locus of control* didefinisikan sebagai suatu kendali yang terdapat pada diri seseorang terhadap suatu peristiwa (Triana et al., 2012). *Locus of control* dibagi menjadi dua yaitu internal *locus of control* dan eksternal *locus of control*. Seseorang yang memiliki internal *locus of control* diperkirakan cenderung untuk tidak menciptakan kesenjangan anggaran meskipun ia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sementara seseorang yang memiliki eksternal *locus of control* akan cenderung untuk menciptakan senjangan anggaran bila ia berkesempatan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran karena keraguan yang dimilikinya (Ngurah Gede Pande Hendra Pranata, 2017).

Teori yang sering dibahas dalam literatur adalah *Attribution Theory* (Teori Atribusi), teori tersebut ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, dan dikembangkan kembali oleh Harold Kelley pada tahun 1972. Menurut Fritz Heider, *attribution theory* diartikan sebagai faktor eksternal maupun faktor internal yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu menentukan penyebab suatu peristiwa atau perilaku seseorang maupun diri sendiri (Schmitt, 2015).

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dalam pemerintahan desa dapat meminimalisir *fraud* serta meningkatkan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa yang berkualitas, menyebabkan aparatur desa dapat menjalankan tugas dari pemerintah pusat dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh (L. A. M. Dewi & Damayanthi, 2019), (Kuntadi et al., n.d.), (Puspita & Ratnadi, 2023), (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019), menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu system pengendalian dari dalam atau pihak internal organisasi untuk mengawasi dan menilai sumber daya organisasi serta mempunyai peran penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya terjadinya *fraud*. Sistem pengendalian internal merupakan bentuk kontrol yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan tugas oleh aparatur desa, sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menjalankan wewenang yang didelegasikan oleh pemerintah pusat atau prinsipal untuk mengelola dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Damayanthi, 2019), (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019), (Puspita & Ratnadi, 2023), (Kuntadi et al., n.d.), menyatakan bahwa

terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Moralitas individual merupakan aspek pendukung guna mencegah terjadinya *fraud*. Seseorang yang memiliki tingkat moral yang rendah penalaran memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang memiliki tingkat penalaran rendah semangat tinggi jika seseorang menghadapi dilema etis. Penelitian yang dilakukan oleh (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019), (Gst Ngr P Putra et al., 2022), (Kuntadi et al., n.d.), (Sarmigi et al., 2023), menunjukkan bahwa moralitas individual berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

*Locus of control* yaitu suatu konsep yang menjelaskan tentang persepsi seseorang terhadap siapa yang menentukan nasibnya (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019). Menurut Kreitner dan Kinicki (2001) dalam (Raditya & Wirajaya, 2018) menyatakan bahwa terdapat dua pembagian yaitu internal *locus of control* dan eksternal *locus of control*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wirakusuma & Setiawan, 2019), (Wahyudi et al., 2021), (Eka Yustikarana & Wirakusuma, 2019), (Raditya & Wirajaya, 2018), menunjukkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti termotivasi untuk menguji kembali mengenai pencegahan *fraud* yang dikaitkan dengan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, moralitas individual dan *locus of control*. Penelitian ini juga termotivasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Alasan pemilihan di Kota Denpasar yaitu Kota Denpasar menjadi salah satu Kabupaten yang mendapat penyaluran dana desa terkecil, dan menjadi salah satu kota dengan pengelolaan keuangan yang terbukti sangat baik. Hal ini dipertegas oleh hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali yang menunjuk Pemerintah Kota Denpasar sebagai lokasi dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kinerja dana desa. Dari hasil pemeriksaan tersebut terbukti bahwa desa yang ada di Kota Denpasar memang sangat maju dalam pengelolaan dana desa sehingga terdapat tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan penghargaan tersebut agar kedepannya dapat mempertahankan pengelolaan dana desa terbaik, serta adanya indikasi tindakan melakukan *fraud* dana desa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian merupakan rancangan utama penelitian yang memberikan gambaran umum terkait penelitian secara keseluruhan. Menurut Sugiyono (2018:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini mengambil lokasi di desa yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Denpasar. Kota Denpasar dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2018 Kota Denpasar sebagai salah satu kota dengan pengelolaan keuangan yang terbukti sangat baik. Hal ini dipertegas oleh hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali yang menunjuk Pemerintah Kota Denpasar sebagai lokasi dalam survey terhadap kinerja dana desa. Pada desain penelitian ini, diuraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan selama penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan.

Populasi dari penelitian ini yaitu perangkat desa yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Denpasar antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Setiap desa ditentukan tiga orang perangkat desa yang berkedudukan di 27 Desa se-Kota Denpasar sehingga populasi yang di dapat sebesar  $27 \text{ desa} \times 3 \text{ orang} = 81 \text{ orang}$ .

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi (Sugiyono, 2018:137). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling yaitu dengan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang di bentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi (Sugiyono, 2013). Kriteria yang dijadikan dasar pemilihan anggota sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa yaitu mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data analisis menggunakan regresi linier berganda.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Pengujian Instrumen Penelitian**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil pengujian instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan sebelum menyebar kuesioner secara keseluruhan yaitu dengan menggunakan jawaban responden yang sesungguhnya sebanyak 81 kuesioner yang telah Kembali dari total jumlah sampel yaitu 81 orang.

#### **Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji validitas dijelaskan bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari item-item pernyataan kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ), sistem pengendalian internal ( $X_2$ ), moralitas individual ( $X_3$ ), *locus of control* ( $X_4$ ) dan pencegahan *fraud* ( $Y$ ) adalah valid. Hal

tersebut dikarenakan, nilai pearson correlation dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Varia2bel	Nilai Cronbach's Alpha
1	Kompetensi Aparatur Desa	0,964
2	Sistem Pengendalian Internal	0,952
3	Moralitas Individual	0,926
4	<i>Locus of control</i>	0,981
5	Pencegahan <i>Fraud</i>	0,824

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa, seluruh item pernyataan pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal. Hal tersebut dikarenakan, seluruh item pernyataan mengenai kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ), sistem pengendalian internal ( $X_2$ ), moralitas individual ( $X_3$ ), *locus of control* ( $X_4$ ) dan pencegahan *fraud* ( $Y$ ) memiliki cronbach alpha lebih besar dari 0,70 sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

### Karakteristik Responden

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

Karakteristik	Jumlah (Orang)
<b>Jabatan</b>	
Kepala Desa/Perbekel	27
Sekretaris Desa	27
Kaur Keuangan	27
<b>Jenis Kelamin</b>	
Laki-Laki	45
Perempuan	36
<b>Umur (Tahun)</b>	
20-35	18
36-50	41
>50	22
<b>Pendidikan Terakhir</b>	
D1	1
D3	7
S1	47
S2	3
SMA	23

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat profil responden dengan karakteristik sebagai berikut.

#### 1. Jabatan responden

Jabatan responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa atau perbekel yang berjumlah 27 orang, sekretaris desa berjumlah 27 orang, kaur keuangan berjumlah 27 orang dengan total keseluruhan berjumlah 81 responden.



## 2. Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan dengan total 81 responden. Responden penelitian dengan jenis kelamin laki laki berjumlah 45 orang dan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 36 orang.

## 3. Umur Responden

Umur responden penelitian ini dibedakan menjadi tiga yaitu kurang dari 20-35 tahun, 36-50 tahun dan lebih dari 50 tahun dengan total 81 responden. Responden penelitian dengan umur kurang dari 20-35 tahun berjumlah 18 orang, umur 36-50 tahun berjumlah 41 orang, dan responden dengan umur diatas 50 tahun berjumlah 22 orang.

## 4. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan terakhir responden dibedakan menjadi lima yaitu D1, D3, S1, S2 dan SMA dengan total 81 responden. Responden penelitian dengan pendidikan terakhir D1 berjumlah 1 orang, responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 7 orang, responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 47 orang, responden dengan pendidikan terakhir S2 berjumlah 3 dan untuk responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 23 orang. Dengan bekal latar belakang pendidikan yang dimiliki serta kemauan aparatur desa untuk mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dana desa, aparatur desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengelola dana desa, sehingga tercipta akuntabilitas dalam pengelolaannya (Wijaya & Suardana, 2019).

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

**Tabel 4. Hasil Stastistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimal	Maximum	Rata-rata	Standar Deviasi
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	81	16,00	32,00	27,10	4,471
Sistem Pengendalian Internal (X2)	81	20,00	40,00	35,93	4,538
Moralitas Individual (X3)	81	16,00	32,00	26,58	3,908
<i>Locus of control</i> (X4)	81	18,00	24,00	20,00	2,720
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	81	12,00	20,00	17,10	2,160

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa jumlah responden (N) sebanyak 81 orang dengan penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut.

### **1. Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ )**

Nilai rata-rata kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) sebesar 27,10 atau mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 32,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju dan sangat setuju atas sembilan pernyataan kuesioner terkait kompetensi aparatur desa dengan total jawaban responden terendah yaitu 16,00. Nilai standar deviasi variabel kompetensi aparatur desa sebesar 4,471 yang lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya, yang memiliki arti bahwa penyimpangan data pada variabel kompetensi aparatur desa sangat kecil.

### **2. Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ )**

Nilai rata-rata sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) sebesar 35,93 atau mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 40,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju dan sangat setuju atas sebelas pernyataan kuesioner terkait sistem pengendalian internal dengan total jawaban responden terendah yaitu 20,00. Nilai standar deviasi sebesar 4,538 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, artinya penyimpangan data pada variabel sistem pengendalian internal sangat kecil.

### **3. Moralitas Individual ( $X_3$ )**

Nilai rata-rata moralitas individual ( $X_3$ ) sebesar 26,58 atau mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 32,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju dan sangat setuju atas sebelas pernyataan kuesioner terkait sistem pengendalian internal dengan total jawaban responden terendah yaitu 16,00. Nilai standar deviasi sebesar 3,908 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, artinya penyimpangan data pada variabel sistem pengendalian internal sangat kecil.

### **4. Locus of control ( $X_4$ )**

Nilai rata-rata *locus of control* ( $X_4$ ) sebesar 20,00 atau mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 24,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju dan sangat setuju atas sebelas pernyataan kuesioner terkait sistem pengendalian internal dengan total jawaban responden terendah yaitu 18,00. Nilai standar deviasi sebesar 2,720 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, artinya penyimpangan data pada variabel sistem pengendalian internal sangat kecil.

## 5. Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Y)

Nilai rata-rata pencegahan *fraud* (Y) sebesar 17,10 atau mendekati nilai maksimum yaitu sebesar 20,00 yang berarti bahwa responden cenderung menjawab setuju dan sangat setuju atas sebelas pernyataan kuesioner terkait sistem pengendalian internal dengan total jawaban responden terendah yaitu 12,00. Nilai standar deviasi sebesar 2,160 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, artinya penyimpangan data pada variabel sistem pengendalian internal sangat kecil.

### Hasil Analisis Data

Pada bagian ini menguraikan tentang hasil analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian data penelitian ini menggunakan uji one sampel *Kolmogorof-Smirnov* (K-S), data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai *Asymp.sig* lebih besar dari nilai alpha 0,05 (Ghozali, 2016:157). Hasil uji normalitas dapat disajikan pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		81
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	144.675.436
Most Extreme Differences	Absolute	0,065
	Positive	0,065
	Negative	-0,048
Test Statistic		0,065
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari hasil uji normalitas sebesar 0,200. Hal tersebut berarti, data berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig* lebih besar dari 0,05.

### 3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). Hasil uji multikolinearitas dijelaskan pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Aparatur Desa	0,821	1,218
Sistem Pengendalian Internal	0,781	1,280
Moralitas Individual	0,765	1,308
Locus Of Control	0,937	1,067

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel bebas (*independen*) dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 atau 10 persen dan nilai *variance inflation factor* (VIF) diperoleh lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas (*independen*) dalam model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.977	1.102		1.794	.077
	Kompetensi Aparatur Desa	.003	.024	.018	.146	.885
	Sistem Pengendalian Internal	-.031	.024	-.165	-1.291	.200
	Moralitas Individual	.027	.028	.125	.969	.335
	Locus Of Control	-.026	.037	-.083	-.711	.479

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) sebesar 0,885, sistem pengendalian internal ( $X_2$ ) sebesar 0,200, moralitas individual ( $X_3$ ) sebesar 0,335 dan *locus of control* sebesar 0,479. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

### 5. Uji Regresi Linier Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu berupa program SPSS versi 25. Model analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, moralitas individual, dan *locus of control* pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Kota Denpasar. Dalam model analisis regresi linier berganda yang digunakan sebagai variabel bebas (independen) adalah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, moralitas individual, dan *locus of control* sedangkan variabel terikat (dependen) adalah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil rangkuman analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,497	1,896		0,262	0,794
Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ )	0,201	0,041	0,417	4,918	0,000
Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ )	0,130	0,041	0,273	3,145	0,002
Moralitas Individual ( $X_3$ )	0,109	0,049	0,197	2,239	0,028
<i>Locus of Control</i> ( $X_4$ )	0,179	0,063	0,225	2,839	0,006
R <sup>2</sup>	= 0,551				
<i>Adjusted R Square</i>	= 0,528				
<i>F</i> hitung	= 23,347				
Signifikansi	= 0,000				

Sumber: Data primer diolah, 2024 (Lampiran 12)

Berdasarkan Tabel 8, maka persamaan regresi dan arti dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

$$Y = (0,497) + 0,201X_1 + 0,130X_2 + 0,109X_3 + 0,179X_4 \dots \dots \dots (4)$$

Persamaan regresi (4) menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,497, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal,

moralitas individual dan *locus of control* (nilai  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  adalah 0) maka tidak terjadi pencegahan *fraud*. Variabel satu ( $X_1$ ) memiliki koefisien beta bernilai positif sebesar 0,201 yang berarti bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Variabel dua ( $X_2$ ) memiliki koefisien beta bernilai positif sebesar 0,130 yang berarti sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Variabel tiga ( $X_3$ ) memiliki koefisien beta bernilai positif yaitu sebesar 0,109 yang berarti bahwa moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Variabel empat ( $X_4$ ) memiliki koefisien beta bernilai positif yaitu sebesar 0,179 yang berarti bahwa moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menguji total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas (Ghozali, 2016:171). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square pada Tabel 8 sebesar 0,528. Hal ini berarti, pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, moralitas individual dan *locus of control* sebesar 0,528 atau

### **Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji F atau uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi linier berganda sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila tingkat signifikansi  $F \leq \alpha$  (0,05) maka model ini dikatakan layak uji. Sebaliknya, jika tingkat signifikansi  $F > \alpha$  (0,05) maka model persamaan regresi dapat dikatakan tidak layak uji (Ghozali, 2016:171). Berdasarkan hasil penelitian uji F pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 23,347 dengan signifikansi sebesar  $0,000 \leq \alpha$  (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan model regresi ini layak digunakan.

### **Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ), sistem pengendalian internal ( $X_2$ ), moralitas individual ( $X_3$ ) dan *locus of control* ( $X_4$ ) secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa ( $Y$ ). Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi t kurang dari atau sama dengan 0,05 (Ghozali, 2016:171). Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 8 yang

menunjukkan nilai signifikansi  $t$  dari masing-masing variabel dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai  $t$  positif sebesar 4,918 dan nilai signifikansi  $t$  sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan hipotesis pertama penelitian ini yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
- 2) Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai  $t$  positif sebesar 3,145 dan nilai signifikansi  $t$  sebesar 0,002 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan hipotesis kedua penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
- 3) Variabel moralitas individual memiliki nilai  $t$  positif sebesar 2,239 dan nilai signifikansi  $t$  sebesar 0,028 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel moralitas individual berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang sesuai dengan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
- 4) Variabel *locus of control* memiliki nilai  $t$  positif sebesar 2,839 dan nilai signifikansi  $t$  sebesar 0,006 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel *locus of control* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa yang sesuai dengan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu *locus of control* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian berupa penjelasan terkait dengan hipotesis penelitian.

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa pada Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis satu (H1) diterima. Artinya semakin baik kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh aparatur desa maka pencegahan *fraud* akan semakin tinggi atau baik.

Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah desa di Kota Denpasar memiliki

pendidikan terakhir S1, dan sudah ada lulusan S2 sebanyak tiga orang yang berarti bahwa kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di desa yang berada di Kota Denpasar memiliki kompetensi yang sudah baik yang tercermin dari indikator pengetahuan, keterampilan atau keahlian, serta sikap atau perilaku yang dimiliki oleh aparatur desa, sehingga dalam pengelolaan dana desa tindakan *fraud* dapat diminimalisir dan dihindari agar tujuan dana desa yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat dapat sesuai dengan target dan sasaran yang tepat. Aparatur desa (SDM) merupakan salah satu penunjang utama yang paling menentukan keberhasilan dari masing-masing tugas yang diemban, kompetensi perangkat desa mencakup pengetahuan yang memadai, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui pendidikan formal maupun non formal, serta sikap dan perilaku.

Kualitas manajemen keuangan yang efektif tercermin dari keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki, yang di perkuat oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan. Kompetensi aparatur desa berperan penting terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga menghasilkan laporan yang akuntabel (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019). Individu yang memiliki keterampilan yang tinggi akan berupaya untuk mempertahankan integritas mereka sebagai profesional yang kompeten di dalam suatu organisasi. Seseorang yang terampil tidak akan melakukan keputusan secara gegabah atau ceroboh yang dapat mengancam integritas mereka. Dengan kemampuan yang baik dari setiap pegawai di aparatur desa dan kepatuhan mereka terhadap peraturan mengenai standar pelaporan keuangan dana desa, dapat mengurangi risiko terjadinya penipuan. Oleh karena itu, semakin unggul kompetensi setiap pegawai perangkat desa dalam mengelola dan mengalokasikan dana desa sesuai ketentuan, semakin tinggi pula tingkat pencegahan terhadap *fraud*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yang dimana teori ini dapat diterapkan dalam mengevaluasi penyebab utama perilaku *fraud* yang terjadi di level desa. Ketika aparatur desa memiliki kompetensi yang rendah, masyarakat atau pengawas mungkin cenderung melakukan atribusi internal, dengan menyalahkan individu atas kesalahan atau *fraud* yang terjadi. Sebaliknya, jika kompetensi aparatur desa tinggi namun *fraud* tetap terjadi, penyebabnya mungkin lebih cenderung diatribusikan pada faktor eksternal, seperti sistem pengawasan yang lemah atau ketidakjelasan kebijakan. Hubungan ini dapat membantu pihak pengawas atau masyarakat memahami akar penyebab masalah dan menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif. Misalnya, jika *fraud* disebabkan oleh faktor internal, seperti rendahnya kompetensi, solusinya bisa berupa peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa. Jika *fraud* disebabkan oleh faktor eksternal, maka perlu ada perbaikan dalam regulasi, sistem pengawasan, atau penegakan hukum.



Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kuntadi et al., n.d.) yang menemukan bahwa menemukan bahwa kompetensi aparatur desa semakin tinggi kualitas output laporan keuangan yang dihasilkan, ini mengindikasikan bahwa semakin kecil celah untuk melakukan Tindakan kecurangan dan semakin tinggi upaya pencegahan tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wirakusuma & Setiawan, 2019) di mana hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dua (H2) diterima. Artinya semakin memadai sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan oleh pegawai perangkat desa berupa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan maka upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Sistem pengendalian internal yang terintegrasi dapat menekan pelaku tindakan *fraud* dalam melakukan praktik kecurangan terhadap pengelolaan dana desa atau dengan kata lain semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah, maka semakin baik upaya pencegahan tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat pemerintah desa di Kota Denpasar yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab setuju dan sangat setuju atas pernyataan pada indikator pengujian variabel sistem pengendalian internal. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan baik pada pemerintahan desa di Kota Denpasar menyebabkan pencegahan *fraud* semakin tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi, pengendalian internal merupakan mekanisme kontrol yang menjadikan kegiatan di suatu instansi berjalan dengan baik yang sesuai dengan harapan. Pengendalian yang dijalankan dengan ketat dan baik akan mengontrol bahkan menghambat kemungkinan seseorang melakukan tindakan kecurangan (Nurjanah & Setiawan, 2021). Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi. Semakin efektif sistem pengendalian internal di dalam suatu perusahaan

maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi (Wirakusuma & Setiawan, 2019).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita & Ratnadi, 2023) menunjukkan semakin kuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa, maka semakin tinggi upaya pencegahan *fraud*. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santi Putri Laksmi & Sujana, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Joseph, 2015) yang menyatakan terdapat hubungan signifikan dan positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendektasian fraud.

### **Pengaruh Moralitas Individual pada Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis tiga (H3) diterima. Artinya semakin baik moralitas individual yang telah dilaksanakan oleh pegawai perangkat desa berupa kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas, serta sikap individu yang melakukan tindakan tidak jujur maka upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. (Suarniti & Ratna Sari, 2020) menyatakan bahwa moralitas yaitu nilai dan standar yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Moralitas juga dapat dilihat dari tindakan atau tingkah laku dan tutur kata seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima serta menyenangkan di masyarakat, maka dianggap sehat secara moral dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang dimana menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal, seperti moralitas individu. Moralitas ini terbentuk dari kondisi internal, yang memungkinkan individu untuk menilai penyebab dibalik tindakan yang mereka lakukan. Dengan kata lain, individu yang memiliki tingkat penalaran moral yang tinggi cenderung bertindak secara etis karena mereka lebih peka terhadap isu-isu etika, sementara sebaliknya berlaku bagi mereka yang memiliki penalaran moral lebih rendah (Nurjanah & Setiawan, 2021).

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kuntadi et al., n.d.) yang menemukan bahwa semakin kuat moralitas individu maka semakin kecil kemungkinan seorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sarmigi et al., 2023) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh *Locus of control* pada Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa**

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa, *locus of control* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis empat diterima (H4). Artinya semakin baik *locus of control* yang dimiliki oleh seorang individu berupa nasib, sosial ekonomi, serta pengaruh orang lain menyebabkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa semakin baik.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan perangkat desa yang dijadikan responden cenderung menjawab setuju dan sangat setuju pada enam pernyataan dengan tiga indikator yaitu nasib, sosial ekonomi, serta pengaruh orang lain dalam menghadapi tekanan terkait dengan internal *locus of control* yang berarti aparat desa di Kota Denpasar memiliki *locus of control* yang baik sehingga menyebabkan pencegahan *fraud* akan semakin tinggi.

Seseorang dengan *locus of control* internal cenderung menempatkan faktor kemampuan dan usahanya sebagai penentu utama. Jika mengalami kegagalan, mereka cenderung menyalahkan diri sendiri karena merasa usaha yang dilakukan masih kurang. Begitu juga, jika meraih keberhasilan, mereka akan merasa bangga karena merasa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari usaha keras yang telah mereka lakukan. Persepsi ini akan memengaruhi langkah-langkah mereka ke depannya, di mana mereka cenderung yakin bahwa usaha keras akan membawa mereka menuju keberhasilan. Sebaliknya jika seseorang dengan *locus of control* eksternal cenderung melihat faktor kesulitan dan keberuntungan sebagai pengaruh utama terhadap keberhasilan atau kegagalan. Oleh karena itu, ketika menghadapi kegagalan, mereka lebih condong untuk menyalahkan lingkungan sekitarnya. Dampak dari pandangan ini pada tindakan di masa depan adalah bahwa mereka kurang memiliki harapan untuk memperbaiki kegagalan karena merasa tidak mampu untuk mengubah nasib mereka sendiri.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, di mana penyebab *fraud* dilihat dari dalam diri. Aparatur ini akan lebih sadar akan tanggung jawab pribadi mereka dalam mengelola dana desa secara jujur. Di sisi lain, *locus of control* eksternal lebih mengarah pada cara pandang individu yang menganggap segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada di luar kontrol

diri mereka. Individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab di luar kendalinya. Individu dengan eksternal *locus of control* mudah untuk merasionalisasikan suatu tindakan kecurangan karena mereka beranggapan bahwa peristiwa yang terjadi pada mereka tidak dapat mereka kontrol (I. G. A. O. K. Dewi et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raditya & Wirajaya, 2018) yang menunjukkan bahwa semakin baik *locus of control* yang dimiliki oleh aparatur desa, maka semakin tinggi upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi et al., 2019) yang menemukan bahwa *locus of control* berpengaruh positif pada pencegahan *Fraud* pengelolaan dana desa.

#### 4. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini ada sebagai berikut.

- 1) Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal ini berarti kompetensi aparatur desa dalam pengetahuan, keahlian dan berperilaku dapat mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 2) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Semakin memadai sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 3) Moralitas individual berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. semakin baik moralitas individual yang telah dilaksanakan oleh pegawai perangkat desa berupa kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, menaati setiap aturan yang berlaku di dalam entitas, serta sikap individu yang melakukan tindakan tidak jujur maka upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa akan semakin baik.
- 4) *Locus of control* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Seseorang yang memiliki *locus of control* internal yang tinggi yaitu semakin baik *locus of control* yang dimiliki oleh seorang individu berupa nasib, sosial ekonomi, serta pengaruh orang lain menyebabkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa semakin baik.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2379. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p28>
- Budiana, D. A., Said, D., & - (2019). The effect of village device competencies and internal control system on accountability of village management. *Scientific Research Journal*, 7(1), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Dewi, I. G. A. O. K., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh locus of control dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris organisasi perangkat daerah Kabupaten Badung). *Jurnal Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 296–320. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1507>
- Dewi, L. A. M., & Damayanthi, I. G. A. E. (2019). Pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal pada pencegahan fraud. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2375. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p26>
- Dharma Putri, N. L. G. E., Erlina Wati, N. W. A., & Andayani W, R. D. (2023). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, locus of control dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi pada lembaga perkreditan desa (LPD) se-Kecamatan Abiansemal. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 275–285. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.3858>
- Eka Yustikarana, P. B., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh kemampuan dan keterlibatan pengguna terhadap kinerja sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 1983. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p13>
- Gst Ngr P Putra, I. B., Ketut Puja Wirya Sanjaya, I., & Bagus Made Putra Manuaba, I. (2022). Internal control systems, morality, integrity, and their influence on the prevention of fraud in village financial management. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 5(4).
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does competency, commitment, and internal control influence accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.223>
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p15>
- Kohlberg, L. (1969). Continous and discontinuities in childhood and adult moral development. In *Theoretical Perspectives on Moral Development* (pp. 99–120).

- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kuntadi, C., Meilani, A., Velayati, E., & Penulis, K. (n.d.). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4>
- Mali, V. (2013). A study on locus of control and its impact on employees' performance. *International Journal of Science and Research*, 2(12), 149–151.
- Mariska, W. (2018). The effect of competence, commitment, and regulation on the accountability of village financial management with moderated spirituality. *International Journal of Advanced Research*, 6(8), 455–462. <https://doi.org/10.21474/ijar01/7542>
- Ndege Joseph, O., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of internal control on fraud detection and prevention in district treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47–57. [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org)
- Ngurah Gede Pande Hendra Pranata, I. G. A. M. A. D. P. (2017). Document (3). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2).
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Nurjanah, I. A., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 517–528. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.396>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Permendagri. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.765>
- Puspita, N. K. M. C., & Ratnadi, N. M. D. (2023). Kompetensi, sistem pengendalian internal, locus of control, dan pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 346. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p05>
- Raditya, P. A., & Wirajaya, I. G. A. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran dan penekanan anggaran pada selisih anggaran dengan locus of control sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(2), 1584. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p28>
- Rizki, K., & Annasa. (2023). Dana desa 2023, realisasi belanja capai Rp54,71 triliun. Minggu, 22 Oktober. <https://market.bisnis.com/read/20231022/189/1706661/dana-desa-2023-realisisi-belanja-capai-rp5471-triliun>

- Santi Putri Laksmi, P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Sarmigi, E., Sumanti, E., & Helfenta, H. (2023). Kecenderungan fraud pengelolaan dana desa: Dampak dari sistem pengendalian internal dan moralitas individu. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(2), 11–18. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i2.1145>
- Schmitt. (2015). Attribution theory. In *Attribution Theory* (pp. 366–373). <https://doi.org/10.1002/9781444323528.ch46>
- Setiawan, S. (2018). The effect of internal control and individual morality on the tendency of accounting fraud. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.04>
- Suarniti, N. L. P. E., & Ratna Sari, M. M. (2020). Pengaruh moralitas individu, komitmen organisasi dan kesesuaian kompensasi pada kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 319. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p04>
- Supartika, P. (2021). Komunitas sekolah anti korupsi Bali catatkan data korupsi paling banyak terjadi di LPD & desa. *Tribun-Bali.Com*. <https://bali.tribunnews.com/2021/12/09/komunitas-sekolah-anti-korupsi-bali-catatkan-data-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-lpd-desa-adat>
- Syaifulloh, M. (2015). Understanding of village apparatus on implementation accounting villages. *International Journal of Science and Research*, 6(8), 2319–7064. <https://doi.org/10.21275/ART20176211>
- Triana, M., Yuliusman, & Putra, W. E. (2012). Pengaruh partisipasi anggaran, budget emphasis, dan locus of control terhadap slack anggaran. *E-Jurnal Binar Akuntansi*, 1(1), 51–56.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2019). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. *International Journal of Financial Research*, 10(6), 211–217. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17, 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>
- Wijaya, I. K. K., & Suardana, K. A. (2019). The affecting factors accountability of village funds management in Seririt Sub-District. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 7(2), 565–578. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh pengendalian internal, kompetensi dan locus of control pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1545. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p26>

- Yetty Murni, Shanti Lysandra, L. N. M. (2018). Pengaruh penyajian laporan keuangan desa, lingkungan pengendalian dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Journal of Accounting and Audit Studies*, 6, 139–154. <https://doi.org/10.16383/j.aas.2018.cxxxxxx>
- Zamzami. (2015). The effectiveness of fraud prevention and detection methods at universities in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*. <https://doi.org/10.1177/194277511100600502>